Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Komunikasi
Volume 6, Nomor 3, November 2026
E-ISSN : 2827-7945; P-ISSN : 2827-8127; Hal. 51-69
DOI: https://doi.org/10.55606/juitik.v6i3.2638
Tersedia: https://journal.sinov.id/index.php/juitik

Analisis Wacana Pemberitaan Penggunaan APBN dalam Proyek Pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam Media Kompas.com

Salsabila Ramadhani [1*], Pandan Yudhapramesti [2], Nuryah Asri Sjafirah [3]
[1-3] Jurnalistik, Universitas Padjadjaran, Indonesia
Email: ssalsabilaram@gmail.com [1], pandan@unpad.ac.id [2], nuryah.asri@unpad.ac.id [3]

**Penulis Korespondensi: ssalsabilaram@gmail.com*

Abstract*. This study shows how Kompas.com constructs news coverage on the use of the State Budget (APBN) in the IKN development project. This study uses a critical paradigm with a descriptive qualitative approach to deeply reveal how power, domination, and ideology influence the formation of meaning using the critical discourse analysis method of Teun A. van Dijk's model and the theory of the hierarchy of influence developed by Shoemaker & Reese. Using seven Kompas.com news reports as research objects and research subjects in the form of parties involved in the news production process. The results of the study show that Kompas.com's news discourse tends to be constructed as a form of legitimacy for the use of the APBN in the IKN development project through the dominance of the government's perspective. This construction is reflected through the emphasis on the government's perspective through information sourced from government actors, as well as the use of language that supports the narrative of the use of the APBN in the IKN development. This is demonstrated through the text structure, social cognition, and social context that consistently direct readers to the meaning that the use of the APBN is a legitimate funding instrument regulated by law and is part of the government's commitment to realizing the IKN development.*

Keywords*: Capital City; IKN; Kompas.com; Nusantara; State Budget.*

Abstrak. Penelitian ini menunjukkan bagaimana Kompas.com mengonstruksi pemberitaan penggunaan APBN dalam proyek pembangunan IKN. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengungkap secara mendalam bagaimana kekuasaan, dominasi, dan ideologi memengaruhi pembentukan makna dengan menggunakan metode analisis wacana kitis model Teun A. van Dijk dan teori hierarki pengaruh isi media yang dikembangkan oleh Shoemaker & Reese. Menggunakan tujuh pemberitaan Kompas.com sebagai objek penelitian dan subjek penelitian berupa pihak yang terlibat dalam prosen produksi berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana pemberitaan Kompas.com cenderung dikonstruksi sebagai bentuk legitimasi terhadap penggunaan APBN dalam proyek pembangunan IKN melalui dominasi perspektif pemerintah. Konstruksi tersebut tercermin melalui penonjolan sudut pandang pemerintah melalui informasi yang bersumber dari aktor-aktor pemerintah, serta penggunaan bahasa yang mendukung narasi penggunaan APBN dalam pembangunan IKN. Hal tersebut ditunjukkan melalui struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial yang secara konsisten mengarahkan pembaca pada pemaknaan bahwa penggunaan APBN merupakan instrumen pendanaan yang sah yang diatur di dalam undang-undang dan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam merealisasikan pembangunan IKN.

Kata kunci: APBN; Ibu Kota; IKN; Kompas.com; Nusantara.

1. LATAR BELAKANG

Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang IKN menjadi Undang-Undang IKN pada 18 Januari 2022. Hal ini menandakan secara resmi dimulainya proses pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara. Pemindahan ibu kota kerap menjadi rencana atas kekhawatiran pemerintah terhadap kota Jakarta yang penduduknya kian melebihi populasi serta banyaknya permasalahan-permasalahan di dalamnya yang dianggap menghambat pertumbuhan negara. Dalam hal tingginya jumlah penduduk pada suatu

Naskah Masuk: 09 Juni 2026; Revisi: 12 Juli 2026; Diterima: 03 Agustus 2026; Terbit: 01 November 2026

negara, kadang kala hal tersebut yang menjadi faktor penghambat pertumbuhan negara tersebut.

Hal ini dikarenakan tingginya angka penduduk suatu negara kadang menimbulkan banyak permasalahan yang menjadi salah satu faktor daya saing negara Indonesia semakin rendah dibandingkan dengan negara lain (Budrugeac, 2009, sebagaimana dikutip dalam Milanda et al., 2024). Meski begitu, berdasarkan hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia pada 19 Desember 2021, sebanyak 61,9 persen responden tidak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota negara dengan alasan beragam seperti, pemborosan anggaran, lokasi yang dipilih tidak strategis, Jakarta dinilai sudah cukup memadai sebagai ibu kota negara, dan ketakutan atas hutang yang nantinya kian bertambah.

Dalam artikel yang dimuat oleh BBC Indonesia, Fraksi PKS Hamid Noor Yasin mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran IKN yang diperkirakan sebesar Rp 466 triliun juga membebani utang pemerintah yang saat itu telah mencapai Rp 6.687,28 triliun, setara dengan 39,69% PDB Indonesia. APBN kemudian menjadi sorotan karena dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022, APBN disebutkan menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang sah dan menanggung sebesar 20 persen total pembiayaan yang disebutkan sebesar Rp 90,4 triliun hingga 2045 mendatang.

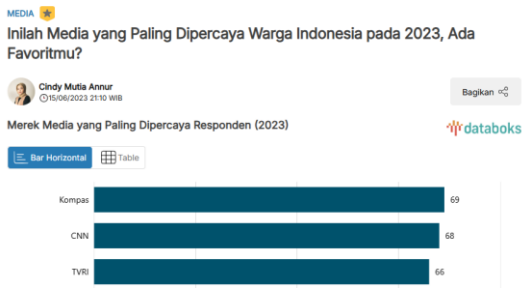
Namun, hingga akhir 2024 Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa sebanyak Rp 89 triliun dana telah dialokasikan untuk pembangunan IKN. Lebih lanjut Kepala Kanwil DJPb Kaltim, Edih Mulyadi, menyampaikan bahwa realisasi belanja IKN pada 2025 adalah sebesar Rp 11,38 triliun atau 78,59 persen dari total pagu sebesar Rp 14,48 triliun. Hal ini membuktikan bahwa total APBN yang mengalir untuk membiayai pembangunan IKN hingga 2025 adalah sebesar Rp 103,48 triliun, lebih besar dari rencana awal yang hanya menanggung beban sebesar 90,4 triliun atau sebanyaknya 20 persen dari total anggaran yang dibutuhkan.

Kenyataannya porsi APBN cukup besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, gedung pemerintahan, dan fasilitas publik lainnya yang menunjang pengadaan IKN. Hal ini menimbulkan kekhawatiran publik bahwa pembangunan IKN akan membebani APBN serta hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Atas kekhawatiran ini, media-media nasional Indonesia kian menyoroti porsi APBN yang masih mendominasi dan menjadi tumpuan finansial dalam proyek ini.

Isu ini menjadi perhatian berbagai media arus utama Indonesia karena hubungannya dengan keberlangsungan hidup masyarakat, terlebih dengan dampak kesejahteraan yang dipengaruhi. Dalam konteks ini, media arus utama memainkan peran penting dalam

membentuk pemahaman publik mengenai kebijakan tersebut dan bagaimana media mengonstruksi pemberitaan.

Berdasarkan data yang diakses pada databoks.katadata.co.id, Kompas.com secara konsisten menjadi satu-satunya merek media online yang berada di dalam peringkat 3 teratas media yang paling dipercaya dan paling banyak diakses pada pada peringkat ke-1 di tahun 2023 dan peringkat ke-2 di tahun 2024. Hal ini membuktikan eksistensi Kompas.com sebagai merek media online di Indonesia yang mampu bersaing dan dipercaya publik dalam menyajikan berita.



Gambar 1. Data Media yang Paling Dipercaya di Indonesia Tahun 2023.

Sumber: Databoks.katadata.co.id



Gambar 2. Data Media Online yang Paling Banyak Digunakan Warga Indonesia Tahun 2024.

Sumber: Databoks.katadata.co.id

Kompas.com sebagai media online yang aktif menyajikan informasi mengenai isu pemindahan dan pembangunan IKN selama prosesnya beberapa tahun terakhir dan berdasarkan yang terdapat pada situs resmi bahwa Kompas.com tidak memiliki afiliasi terhadap partai politik dan non-partisan manapun memiliki kebebasan dalam menyampaikan gaya pemberitaannya dan sentimen seperti apa yang dibangun untuk publik.

Pemberitaan media, khususnya yang melibatkan dana publik seperti APBN, tidak hanya berfungsi sebagai informasi, tetapi juga sebagai alat yang membentuk wacana sosial. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana Kompas.com mengonstruksi pemberitaan dan apa saja pengaruh yang berperan serta dalam membentuk pemberitaan. Penelitian ini

disajikan dengan menggunakan metode analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk, yang melihat wacana melalui perspektif analisis teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menguraikan relasi kuasa, dominasi dan ketimpangan yang diproduksi dalam wacana (van Dijk, 1993). Adapun teori yang digunakan adalah teori hierarki pengaruh isi media dari Shoemaker dan Reese untuk menjelaskan bagaimana pengaruh yang terjadi di dalam dan luar ruang redaksi atau organisasi media itu sendiri mempengaruhi isi dari suatu pemberitaan. Teori ini menggambarkan bahwa isi media yang disampaikan kepada khalayak tidak datang dari "ruang hampa" yang netral, bebas kepentingan, dan disalurkan oleh medium yang bebas distorsi, namun merupakan hasil pengaruh kebijakan internal organisasi media dan pengaruh eksternal media itu sendiri. (Musfialdy, 2019).

2. KAJIAN TEORITIS

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa media online Indonesia memiliki kecenderungan yang berbeda-beda dalam mengonstruksi pemberitaan mengenai isu Ibu Kota Nusantara. Witanto, dkk. (2024) dalam analisisnya mengungkapkan bahwa Kompas.com dalam mengonstruksi pemberitaan cenderung menekankan pada aspek informatif dan naratif, berfokus pada penyampaian yang faktual, sejarah, dan konteks-konteks yang lebih luas. Sedangkan CNN Indonesia cenderung menekankan pada perspektif kritik sehingga menciptakan narasi skeptis utamanya terkait kebijakan pemerintah, dampak sosial, masalah pembangunan, dan kontroversi proyek IKN. Kemudian, Tialani dan Hudiono (2023) dalam analisisnya mengungkapkan bahwa CNBC mengonstruksi pemberitaan cenderung mendukung pembangunan IKN dengan menekankan narasi optimisme pemerintah.

Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk

Analisis Wacana Kritis model Teun A. van Dijk merupakan sebuah pendekatan analisis wacana yang berusaha untuk mengungkap hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam teks dan praktik berbahasa. Teun A. van Dijk lebih memilih istilah Studi Wacana Kritis atau *Critical Discourse Studies* (CDS) karena studi ini tidak hanya menganalisis secara kritis, tetapi juga melibatkan teori kritis dan penerapan-penerapannya secara kritis. Dalam studi ini, Teun A. van Dijk juga ingin menekankan analisis sosial yang memperhitungkan sekaligus dimensi linguistik, psikologi (kognisi) dan sejarah (Haryatmoko, 2017). Studi wacana kritis juga membedah bagaimana wacana memproduksi atau mereproduksi dominasi sosial dan ketimpangan sosial dalam konteks sosial dan kognitif sosial. Pendekatan yang khas dari model van Dijk ini mulai terbentuk secara lebih sistematis sekitar tahun 1993, ketika ia menulis artikel berjudul "Principles of Critical Discourse Analysis", yang diterbitkan dalam jurnal *Discourse*

& Society. Artikel ini memperkenalkan kerangka kerja CDA/AWK yang melibatkan tiga dimensi utama analisis, yaitu struktur teks, konteks sosial, dan kognisi sosial: 1) Teks: Bentuk kebahasaan dari wacana yang mencakup pilihan kata, struktur kalimat, dan cara teks disusun. 2) Kognisi Sosial: Representasi sosial yang berkaitan dengan latar belakang ideologi dan kepercayaan kelompok sosial tertentu dalam memproduksi dan memahami wacana. 3) Konteks Sosial: Menggambarkan kondisi sosial, budaya, situasi masyarakat secara keseluruhan yang menjadi latar produksi wacana.

Dalam dimensi teks, van Dijk mengungkapkan ada tiga struktur penting yang bisa dianalisis

1. **Struktur Makro**

   Makna global dari teks yang berfokus pada tema atau topik utama. Topik ini menggambarkan sikap produsen teks terhadap isu yang dibahas.

2. **Superstruktur**

   Skema atau kerangka teks yang mengatur subtopik dan penempatan informasi. Pada teks berita, superstruktur mencakup analisis judul, lead, isi, dan penutup wacana.

3. **Struktur Mikro**

   Makna lokal dari teks yang berfokus pada latar, detail, maksud, praanggapan, bentuk kalimat, koherensi, kata ganti, pilihan kata, grafis, dan metafora.

Dalam perspektif AWK van Dijk, pemberitaan media yang dalam penelitian ini adalah Kompas.com mengenai penggunaan APBN dalam pembangunan IKN dapat merefleksikan suatu ideologi tertentu melalui pemilihan topik, diksi, penonjolan fakta, dan struktur narasi. Konstruksi tersebut berpotensi membentuk persepsi publik mengenai apakah kebijakan tersebut dipandang sebagai langkah strategis pembangunan nasional atau sebagai beban fiskal negara.

Hierarki Pengaruh Isi Media Shoemaker & Reese

Pamela Shoemaker dan Stephen D. Reese mengembangkan teori hierarki pengaruh isi media untuk menjelaskan bagaimana pengaruh internal dan eksternal yang mempengaruhi isi dari suatu pemberitaan. Musfialdy (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pengaruh internal pada konten media sebenarnya berhubungan dengan kepentingan dari pemilik media, individu wartawan sebagai pencari berita, dan rutinitas organisasi media. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi konten media berhubungan dengan para pengiklan, pemerintah, masyarakat, dan faktor eksternal lainnya. Shoemaker dan Reese mengembangkan faktor-faktor dari pengaruh tersebut yang terbagi ke dalam lima level berbeda, yaitu individu pekerja media (*individual level*), rutinitas media (*media routines level*), organisasi media *(organizational*

level), luar media (*extramedia level*), dan ideologi (*ideology level*). Musfialdy (2019) menjelaskan secara ringkas lima level hierarki sebagai berikut.

1. **Individual Level**

   Faktor yang dilatarbelakangi oleh sikap personal dan pengalaman profesional individu yang terlibat dalam pembuatan suatu isi media.

2. **Media Routines Level**

   Media rutin dibentuk oleh tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu sumber berita (*suppliers*), organisasi media (*processor*), dan khalayak (*consumers*). Sumber berita atau suppliers adalah sumber berita yang didapatkan media untuk pemberitaan. Organisasi media (*processor*) bisa disebut sebagai redaksi yang mengemas pemberitaan dan selanjutnya dikirim kepada khalayak. Terakhir, khalayak (*consumers*) adalah konsumen berita yaitu pendengar, pembaca atau penonton.

3. **Organizational Level**

   Level ini berkaitan dengan struktur manajemen organisasi, kebijakan dan tujuan media.

4. **Extramedia Level**

   Pengaruh-pengaruh yang berasal dari luar organisasi media, seperti sumber berita, *public relation*, pengiklan dan penonton, pemerintah, pangsa pasar dan teknologi.

5. **Ideology Level**

   Ideologi dipandang sebagai kerangka berpikir tertentu yang dipakai individu untuk melihat realitas dan bagaimana menghadapinya. Level ini bersifat abstrak dan berhubungan dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsir realitas dalam media.

Teori ini menggambarkan bahwa isi media yang disampaikan kepada khalayak tidak datang dari ”ruang hampa” yang netral, bebas kepentingan, dan disalurkan oleh medium yang bebas distorsi, namun merupakan hasil pengaruh kebijakan internal organisasi media dan pengaruh eksternal media itu sendiri. (Musfialdy, 2019).

Begitu juga dengan artikel-artikel berita yang diproduksi oleh Kompas.com. Dengan hierarki jurnalis, editor, dan pemimpin redaksi, serta pengaruh lain di luar ruang redaksi, isi media bukan lagi wacana yang netral dan bebas dari kepentingan, dan hal tersebutlah yang nantinya menjadi pengaruh dalam membentuk persepsi publik.

APBN sebagai Penunjang Finansial Pembangunan IKN

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang memuat estimasi pendapatan dan alokasi belanja negara untuk satu tahun anggaran. APBN menjadi

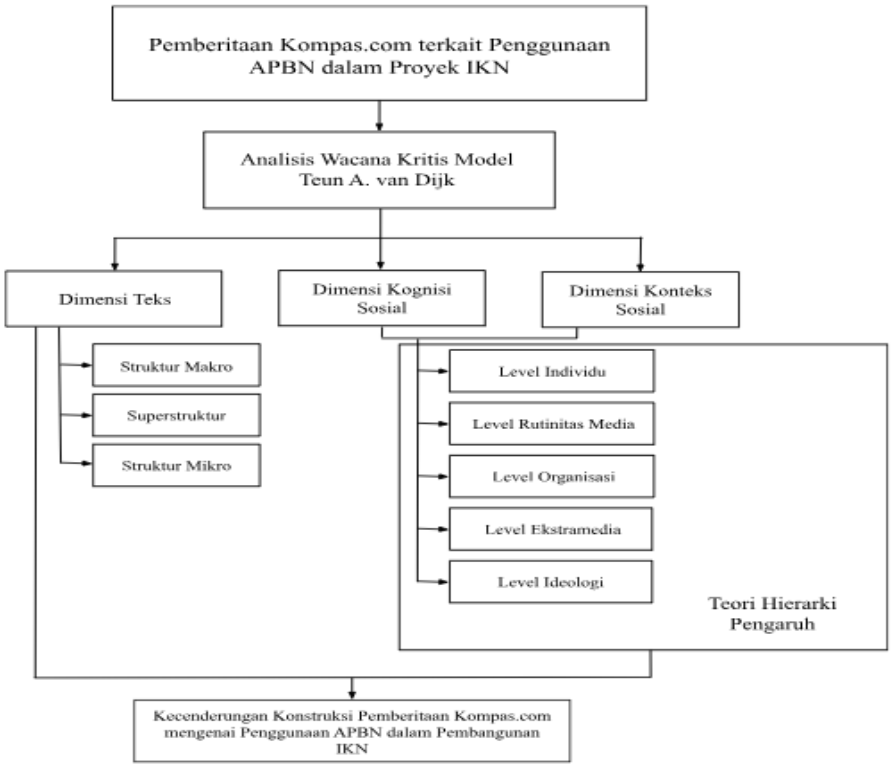
instrumen sah dalam kebijakan fiskal pemerintah yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (7) menyebutkan "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat."

Adapun fungsi dari APBN menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 pada Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta kebutuhan lain yang relevan.", menunjukkan legitimasinya sebagai salah satu skema pendanaan IKN yang sah.

APBN dalam pembiayaan pengadaan pembangunan IKN menjadi instrumen penting dalam pengaturan kebijakan fiskal terkait. IKN awalnya memiliki rencana anggaran sebesar Rp 466 triliun hingga pembangunan rampung pada tahun 2045 dengan APBN hanya menanggung sebesar Rp 90,4 triliun atau sekitar 20 persen sedangkan 80 persen lainnya berasal dari investasi swasta dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang terdapat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Bab VII Pasal 24 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja. Namun, kemudian terdapat perubahan undang-undang menjadi Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 24 terkait sumber pendanaan. Perubahan ini mengubah isi yang mengatur sumber pendanaan IKN menjadi 3, yaitu APBN, APB IKN, dan Sumber lain yang sah. Artinya perubahan undang-undang ini menambahkan sumber pendanaan pembangunan IKN, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara.

Dengan IKN yang memiliki APBN terpisah menegaskan bahwa IKN bukan lagi hanya proyek pembangunan, melainkan pemerintahan Daerah Khusus yang dijalankan Otorita. Hal ini juga memberikan fleksibilitas fiskal bagi Otorita sebagai pengelola anggaran. Meski saat ini sudah memiliki anggaran terpisah, IKN tetap menerima suntikan dana APBN sebagai salah satu sumber pendanaan dalam menunjang pembangunan IKN hingga rampung, setidaknya hingga saat ini.

Kerangka Pemikiran



Gambar 3. Kerangka Berpikir.

Sumber: Olah Data Peneliti, 2026

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengungkap secara mendalam bagaimana kekuasaan, dominasi, dan ideologi bekerja dalam pembentukan makna. Adapun teknik analisis data menggunakan metode analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk dengan menguraikan tiga dimensi, yaitu dimensi teks, dimensi kognisi sosial, dan dimensi konteks sosial. Selain itu, terdapat teori Hierarki Pengaruh Shoemaker & Reese yang mendukung penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana pengaruh internal dan eksternal berperan serta dalam pembentukan wacana dari suatu pemberitaan. Objek penelitian ini merupakan pemberitaan penggunaan APBN dalam proyek pembangunan IKN yang dipublikasi oleh Kompas.com dan menjadi data primer dalam penelitian ini dan subjek penelitian ini adalah Kompas.com.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan dokumentasi terhadap data primer serta wawancara narasumber yang relevan. Data sekunder kemudian diperoleh dengan observasi dan dokumentasi terhadap penelitian terdahulu dan buku yang menjadi rujukan

dalam penelitian ini. Pengumpulan data primer berupa pemberitaan Kompas.com dilakukan dalam periode 1 Oktober 2025 hingga 30 Juni 2025 yang menghasilkan 7 berita. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan konsep *trustworthiness* yang dikembangkan oleh Lincoln dan Guba (1985) dengan kriteria kredibilitas, transferabilitas, kebergantungan, dan konfirmabilitas. Kriteria kredibilitas dilakukan melalui triangulasi sumber.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Teks

Struktur Makro

Secara tematik, Kompas.com dalam pemberitaannya lebih menonjolkan topik wacana yang menunjukkan bahwa pembangunan IKN merupakan agenda strategis pemerintah yang penuh dukungan dari pemangku kebijakan termasuk pada penggunaan APBN di dalamnya. Sehingga, wacana yang dikonstruksi dalam pemberitaan cenderung berfokus pada agenda, kebijakan, dan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam merealisasikan proyek pembangunan IKN serta penggunaan APBN di dalamnya. Pada berita "Tahun Ini, Pemerintah Siapkan Dana Rp39,4 Triliun untuk IKN", "Pembangunan IKN Butuh Anggaran Rp466 Triliun", "Tak Lagi Andalkan APBN, IKN Bergantung pada Investasi Swasta" banyak menonjolkan peran pemerintah sebagai aktor yang penting dalam narasi termasuk dengan adanya pernyataan pemerintah yang menyebutkan komitmen dan dukungannya dalam proyek IKN secara langsung maupun tidak langsung, serta penyebutan angka sebagai besar anggaran yang dikeluarkan negara untuk pembangunan ini tidak digambarkan sebagai beban fiskal baik di dalam judul maupun sebagai isi berita, melainkan digambarkan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap proyek pembangunan ibu kota baru. Hal tersebut memungkinkan pembaca untuk menafsirkan topik bahwa dalam proses pembangunan IKN pemerintah menunjukkan komitmen dan dukungannya dengan anggaran negara APBN yang secara konsisten dialokasikan untuk menunjang pembiayaan tanpa adanya narasi terbebani.

Superstruktur

Dalam perspektif analisis wacana Teun A. van Dijk, penonjolan topik wacana tercermin dalam bagaimana teks berita disusun mulai dari judul, lead, isi, dan penutup berita. Sehingga, struktur skematik penting dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana wartawan dan media menyusun bagian-bagian tersebut secara terstruktur. Dalam penyusunan judul berita, Kompas.com cenderung mengarahkan fokus pada upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendukung keberlanjutan pembangunan IKN, sehingga secara implisit terjadi pembentukan citra positif terhadap pemerintah maupun IKN atas capaian, dukungan, dan komitmen yang

dilakukan. Dalam salah satu pemberitaan yang berjudul "Tahun Ini, Pemerintah Siapkan Dana Rp 39,3 Triliun untuk IKN" mengonstruksi makna bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebagai kebutuhan anual dari pembangunan IKN. Hal tersebut juga menunjukkan adanya kesiapan pemerintah secara finansial dalam memenuhi kebutuhan tahunan pendanaan IKN. Kemudian, pada pemberitaan yang berjudul "UPDATE IKN: Progres 61,7 Persen, Habiskan APBN Rp 89 Triliun" menyoroti bagaimana pembangunan IKN mengalami progres pesat sebesar 61,7 persen. Sorotan terhadap progres yang dialami IKN membuat fokus pembaca tertuju pada citra yang terbangun atas sorotan tersebut. IKN digambarkan sebagai proyek dengan kemajuan yang strategis.

Pada penulisan lead berita, Kompas.com menggunakan pola lead yang berisi ringkasan berita secara keseluruhan sehingga dapat menjelaskan isi pokok dari pemberitaan. Pada berita yang berjudul "Tahun Ini, Pemerintah Siapkan Dana Rp 39,3 Triliun untuk IKN" menggunakan lead berita yang berbunyi,

> "*Tahun ini Pemerintah menyiapkan dana jumbo sebesar Rp 39,3 triliun untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).*"

Lead berita tersebut secara langsung merujuk pada isi pokok berita yang membahas besarnya anggaran tahun 2024 yang disiapkan pemerintah untuk mendukung pembangunan IKN. Kemudian, pada berita yang berjudul "Pembangunan IKN Butuh Anggaran Rp 466 Triliun" lead berita juga secara langsung merujuk pada isi pokok berita.

> "*Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) membutuhkan anggaran sebesar Rp 466 triliun*"

Penggunaan lead ringkasan membuat fokus pembaca tertuju langsung pada bahasan pokok berita yang ingin ditonjolkan oleh Kompas.com. Terlihat pola pembahasan yang berusaha ditonjolkan oleh Kompas.com adalah pada bentuk dukungan serta komitmen yang diupayakan pemerintah berupa pengupayaan penyediaan anggaran.

Pada bagian isi berita, analisis melihat bagaimana informasi dikembangkan dari judul dan lead berita yang sebelumnya telah dikonstruksi. Isi berita dalam ketujuh pemberitaan Kompas.com terkait penggunaan APBN dalam pembangunan IKN cenderung menempatkan pemerintah sebagai fokus utama. Fokus tersebut melibatkan pernyataan pemerintah sebagai sumber yang pasti, data progres sebagai capaian proyek pembangunan IKN, dan kebijakan-kebijakan yang mendukung keberlanjutan pembangunan IKN. Sementara itu, informasi yang berisi kritik dan evaluasi terhadap beban APBN cenderung ditempatkan sebagai informasi pelengkap alur pemberitaan. Dalam pemberitaan yang berjudul "BPK Soroti Pendanaan Pembangunan IKN yang Masih Andalkan APBN" informasi berisi kritik dan evaluasi

pemerintah memang ditonjolkan sebagai isi pokok berita. Namun, terdapat subbab yang kembali membahas progres dari proyek pembangunan IKN. Pembahasan tersebut mengembalikan sorotan pada capaian pemerintah bukan evaluasi yang telah disampaikan.

Pada penutup berita, Kompas.com menempatkan informasi akhir sebagai penegasan kembali atas informasi-informasi yang telah dibangun pada bagian judul, lead, dan isi berita. Meskipun dalam dua berita terdapat unsur kritik dan evaluasi terhadap penggunaan APBN dalam pembangunan IKN, penutup dalam pemberitaan Kompas.com cenderung menghadirkan pernyataan pemerintah yang berisi optimisme pemerintah terhadap pembangunan IKN. Optimisme pemerintah dibangun dengan bentuk dukungan finansial berupa APBN, penjelasan progres pembangunan maupun progres investasi swasta yang telah dicapai IKN.

Struktur Mikro

Semantik

Latar dalam wacana pemberitaan Kompas.com difungsikan sebagai konteks terhadap konstruksi pemberitaan. Dalam berita dengan judul "Soal Proyek IKN, Ekonom Wanti-wanti Jangan Sampai Jadi "Benalu", wacana dijelaskan secara kontekstual debat cawapres pemilu 2024 yang menyoroti pendanaan pembangunan IKN sebagai salah satu isu yang membuka alur berita. Pembahasan debat cawapres sebagai latar difungsikan sebagai konteks agar pembaca dapat memahami bahwa isu pendanaan pembangunan IKN merupakan persoalan yang diperdebatkan secara publik sebelum pemberitaan dielaborasi lebih lanjut melalui isi berita. Kemudian, detail-detail dalam pemberitaan juga dilihat sebagai elemen yang berfungsi untuk memperkuat argumen yang terdapat di dalam berita.

Dalam pemberitaan yang sama, jurnalis menguraikan detail-detail yang melegitimasi kekhawatiran Ekonom Eko Listiyanto terhadap risiko pembiayaan APBN yang mengandalkan APBN. Narasi jangan sampai IKN menjadi "benalu" bagi APBN, memberikan contoh proyek KCJB sebagai pembanding dan memberikan konteks bahwa kekhawatiran terhadap pembiayaan IKN bukan kekhawatiran yang hadir tanpa dasar, kemudian perlunya usaha untuk menggerakan ekonomi IKN sebagai usaha membangun daya tarik dan kepercayaan bagi investor, serta banyaknya Letter of Intent yang dikantongi oleh otorita IKN saja belum cukup untuk dijadikan tiang finansial IKN dan harus ada komitmen nyata investor untuk berinvestasi agar APBN tidak terbebani, dan ditutup dengan menegaskan bahwa porsi APBN yang digunakan terhadap pembangunan IKN telah melebihi porsi yang seharusnya digunakan sebesar 20 persen merupakan detail-detail yang diuraikan jurnalis secara koheren agar pembaca memahami bahwa argumen yang diangkat tidak hadir tanpa sebab.

Sementara itu, maksud dan praanggapan lahir dari uraian narasi pemberitaan baik secara eksplisit maupun secara implisit dan dianggap benar. Dalam berita yang sama, maksud hadir dari bagaimana jurnalis menguraikan informasi yang dipilih untuk ditampilkan dalam pemberitaan sehingga menghadirkan maksud agar pemangku kebijakan tetap berhati-hati atas risiko pendanaan IKN akan terus menjadi beban bagi APBN, serta praanggapan atas proyek pembangunan IKN mendapat sorotan karena skema pendanaan yang masih bergantung dan mengandalkan APBN.

Stilistik

Elemen stilistik berfokus pada pilihan kata (leksikon) yang digunakan jurnalis untuk merepresentasikan suatu hal. Stilistik melihat bagaimana pilihan kata yang digunakan jurnalis dapat memengaruhi konstruksi makna dari wacana tersebut. Di samping itu, pilihan kata-kata yang dipakai menunjukkan sikap dan ideologi tertentu (Eriyanto, 2001). Dalam tujuh berita Kompas.com pilihan kata didominasi dengan kata-kata kritis yang menggambarkan pembangunan IKN yang masih menggunakan sebagian besar pendanaan dengan APBN sebagai hal yang berkonotasi negatif dan mengandung evaluasi kritis, seperti "beban APBN", "bertumpu pada APBN", "mengandalkan APBN", "benalu bagi APBN". Adapun pilihan kata yang digunakan merepresentasikan citra baik dari penggunaan APBN dalam pembangunan IKN, seperti "akselerasi positif" untuk menggambarkan kemajuan dan pertumbuhan yang dialami IKN dalam prosesnya, dan penggunaan kata "lelang" sebagai representasi bahwa pembangunan jalan tol IKN merupakan pembangunan yang secara administratif sah dan merupakan kebutuhan yang rasional. Berdasarkan uraian tersebut, Kompas.com dalam tujuh beritanya menggunakan pilihan-pilihan kata yang disesuaikan dengan isu yang sedang dibahas dan pada suasana yang dibangun dalam pemberitaan.

Retoris

Dalam dimensi retoris Kompas.com dalam tujuh beritanya banyak menggunakan grafis berupa angka-angka yang berfungsi untuk memfokuskan pembaca pada legitimasi data yang digunakan. Hal ini sejalan dengan Eriyanto (2001) yang menyampaikan pendapatnya bahwa penggunaan angka-angka dalam berita di antaranya digunakan untuk mensugestikan kebenaran, ketelitian, dan posisi dari suatu laporan. Grafis angka-angka dalam berita di antaranya disebutkan berupa "Rp 5,6 Triliun", "5,8 persen", "Rp 39,3 triliun", "Rp 72,3 Triliun", "61,7 persen, "Rp 89 Triliun", "500". Adapun penggunaan metafora "benalu" yang memiliki konotasi negatif yang secara harfiah diartikan sebagai parasit yang menumpang hidup dengan organisme lain. Dengan penggunaan diksi ini, jurnalis secara implisit juga ingin memfokuskan pembaca pada permasalahan bahwa IKN dapat menjadi proyek yang tidak

menguntungkan bagi negara terlebih dengan penggunaan APBN yang mendominasi pembiayaan. Berdasarkan uraian tersebut, Kompas.com dalam elemen retoris menggunakan angka-angka sebagai bentuk penekanan pada makna tertentu dalam pemberitaan untuk meyakinkan pembaca bawa wacana pemberitaan ditulis dengan berorientasi pada data yang tersedia.

Analisis Kognisi Sosial

Dalam dimensi kognisi sosial, terdapat 4 skema, yaitu Skema Orang, Skema Peran, Skema Peristiwa, Skema Diri. Eriyanto (2001) menyebutkan bahwa skema dikonseptualisasikan sebagai struktur mental di mana tercakup di dalamnya bagaimana kita memandang manusia, peranan, sosial, dan peristiwa. Skema orang melihat bagaimana citra dari aktor-aktor yang ditampilkan dalam wacana pemberitaan direpresentasikan. Dalam tujuh berita yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdapat tiga kelompok aktor yang dominan dalam merepresentasikan skema orang dalam tujuh wacana pemberitaan, yaitu Pemerintah, Lembaga dan Pengamat Keuangan, serta Investor.

Aktor pemerintah yang disebutkan sebagai Presiden, Menteri PUPR, Menteri Keuangan, dan Otorita IKN direpresentasikan sebagai pihak yang memiliki citra aktif dalam mengambil keputusan dan optimis atas kelancaran proyek pembangunan IKN sebagai ibu kota baru. Representasi ini hadir dari adanya peranan yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut. Dalam skema peran, ketiga aktor yang dominan muncul tersebut direpresentasikan sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam merencanakan pembangunan, mengelola keuangan dan pendanaan, serta bertanggung jawab atas keberlanjutan pekerjaan pembangunan IKN. Hal-hal tersebut dilihat dengan adanya dominasi *point of view* atau sudut pandang pemerintah yang ditonjolkan sebagai aktor yang memiliki kendali atas keberlanjutan pembangunan IKN dalam setiap wacana berita Kompas.com. Sehingga berdasarkan uraian tersebut,tercipta citra aktif dan optimis untuk aktor pemerintah, lembaga dan pengawas keuangan, serta investor.

Dalam teori hierarki pengaruh, uraian tersebut dapat dipengaruhi tiga level pengaruh, yaitu oleh cara pandang individu dalam konteks ini jurnalis, rutinitas media dalam penggunaan gaya bahasa dan pemilihan narasumber, serta organisasi media dalam kebijakan redaksi. Dalam level individu, jurnalis menciptakan narasi tersebut berdasarkan cara berpikir dan pengalaman melakukan wawancara kepada aktor-aktor tersebut yang pada akhirnya membentuk citra seperti apa yang ada dalam pemikiran jurnalis. Kompas.com dalam pemberitaannya selalu mengutip wawancara atau hasil dari konferensi pers pemerintah dan lembaga pengawas keuangan. Hal tersebut membuat aktor-aktor pemerintah menonjol karena redaksi

Kompas.com menganggap pemerintah atau lembaga negara merupakan narasumber yang kredibel dan dianggap kompeten dalam bidangnya.

Informan X memaparkan bahwa Kompas.com memandang pemerintah dalam konteks pemberitaan penggunaan APBN dalam proyek IKN merupakan aktor yang paling sering memberikan informasi. Hal tersebut terjadi karena adanya anggapan bahwa pemerintah merupakan pihak yang memegang proyek IKN secara keseluruhan dan yang berwenang atas penggunaan anggaran negara. Argumen tersebut didukung oleh pernyataan Kunto Adi yang merupakan pakar komunikasi politik dan Kepala Program Studi S3 Universitas Padjadjaran. Kunto Adi mengatakan bahwa dalam penelitian Usman Hamid tahun 2020 dan 2022 memang terdapat budaya dalam pers Indonesia yang sangat dekat dengan *official source*. Pers Indonesia menganggap *official source* atau sumber resmi pemerintahan merupakan sumber yang kredibel. Meski begitu, informan X mengatakan bahwa Kompas.com berprinsip pada kebijakan redaksi yang berimbang, sehingga narasumber seperti pengamat ekonomi dan lembaga pengawas keuangan memiliki peran penting untuk menjaga keberimbangan tersebut.

Kemudian, skema peristiwa ditemukan dengan adanya konstruksi wacana atas skema pendanaan IKN. Konstruksi skema peristiwa dipengaruhi oleh tiga level hierarki pengaruh, yaitu rutinitas media, organisasi, dan ekstramedia. Pengaruh rutinitas media dapat dilihat pada konstruksi gaya bahasa pemberitaan awal yang merepresentasikan APBN sebagai sumber pendanaan yang memiliki peran besar untuk mendukung kebutuhan finansial pembangunan IKN dengan menggunakan satuan dollar AS sebagai pembanding untuk memperlihatkan anggaran yang dikeluarkan. Selanjutnya, seiring proyek ini berjalan muncul pemberitaan yang menyoroti potensi ketergantungan pendanaan pada APBN yang dilakukan oleh BPK selaku lembaga resmi pengawasan keuangan, pada periode 2025 menunjukkan adanya pergeseran skema pembiayaan non APBN dengan masuknya sejumlah investor dari dalam dan luar negeri. Pergeseran konstruksi pemberitaan ini menunjukkan adanya pengaruh dari eksternal redaksi berupa dinamika kebijakan pemerintah dan pengaruh dari dalam media Kompas.com berupa kebijakan editorial dan seleksi informasi yang menyebabkan adanya pergeseran cara Kompas.com mengonstruksi wacana pemberitaan penggunaan APBN dalam pembangunan IKN dari waktu ke waktu.

Uraian-uraian tersebut tidak terlepas dari pengalaman jurnalis di lapangan, cara pandang terhadap dirinya sendiri dan terhadap isu penggunaan APBN dalam pembangunan IKN. Keyakinan dan kepercayaan jurnalis di lapangan terhadap informasi yang bersumber langsung dari *official source* baik itu berupa wawancara, konferensi pers, dan *doorstop* yang kemudian dikutip di dalam pemberitaan. Dalam teori hierarki pengaruh, hal tersebut dapat

dilihat dalam level individu jurnalis sebagai pengaruh konstruksi wacana pemberitaan APBN. Pengalaman dan cara berpikir jurnalis di lapangan termasuk terhadap adanya hubungan antara media dan jurnalis di lapangan dengan *media center* lembaga pemerintah serta penggunaan *official source* pemerintah sebagai sumber yang diyakini dapat menjadi acuan data utama merupakan pengaruh yang terlibat dalam konstruksi wacana pemberitaan.

Analisis kognisi sosial menunjukkan bagaimana proses kognitif jurnalis dan redaksi memiliki pengaruh dalam proses konstruksi wacana pemberitaan. Namun, proses kognitif tersebut tidak berkembang tanpa realitas sosial. Dalam mengonstruksi pemberitaan, media juga dipengaruhi oleh realitas yang terjadi di masyarakat. Menurut van Dijk, dalam analisis mengenai masyarakat ini, ada dua poin penting, yaitu kekuasaan dan akses (Eriyanto, 2001).

Analisis Konteks Sosial

Dalam dimensi konteks sosial, analisis dilakukan dengan menguraikan kondisi sosial yang menjadi latar belakang dari terbentuknya suatu wacana serta menjelaskan bagaimana Kompas.com membentuk makna sosial melalui pemberitaan yang berkaitan dengan relasi dan kekuasaan. Untuk menguraikan konteks sosial analisis wacana kritis Teun A. van Dijk, terdapat dua faktor penting, yaitu praktik kekuasaan dan akses mempengaruhi wacana.

Dominasi *angle* berita yang berfokus pada sudut pandang dan kebijakan pemerintah merupakan cerminan dari adanya praktik kekuasaan yang dijalankan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas penggunaan APBN dalam pembangunan IKN terhadap media Kompas.com. Van Dijk mendefinisikan kekuasaan tersebut sebagai kepemilikan yang dimiliki oleh suatu kelompok untuk mengontrol kelompok lain. Kontrol kekuasaan tidak terbatas pada kontrol fisik, namun dapat berupa kontrol persuasif yang memengaruhi kondisi mental, seperti kepercayaan, sikap, dan pengetahuan (Eriyanto, 2001). Praktik kekuasaan ini tercermin pada kebijakan redaksi dan cara pandang jurnalis terhadap sumber resmi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Informan X memaparkan bahwa redaksi memiliki kebijakan dalam menentukan ketentuan minimum sumber data, yaitu pada situs web resmi pemerintah dan lembaga terkait. Hal tersebut dapat terjadi atas pemahaman bahwa pemerintah memiliki kontrol dan kewenangan besar terhadap proyek IKN yang merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 yang mengatur pendanaan pembangunan IKN, termasuk penggunaan APBN sebagai salah satu sumber pendanaan yang sah, menjadi salah satu sumber resmi (*official source*) dalam pemberitaan media mengenai isu tersebut. Undang-undang ini memberikan dasar hukum sekaligus legitimasi terhadap penggunaan APBN dalam pembangunan IKN. Sehingga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai sumber resmi yang

berkontribusi dalam membentuk legitimasi wacana mengenai penggunaan APBN dalam pembangunan IKN dalam media.

Selain itu, terdapat keyakinan bahwa Bambang Susanto yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Otorita IKN beserta deputi-deputinya merupakan pribadi yang akrab dengan media (*media darling*) dalam perannya sebagai kepala pemerintahan IKN. Budaya tersebut berlanjut kepada penggantinya sebagai Kepala OIKN yang membentuk mental dan kepercayaan Informan X bahwa kepala pemerintahan IKN merupakan sumber informasi yang dekat dengan cara kerja jurnalis. Kedekatan tersebut yang kemudian mencerminkan adanya akses memengaruhi wacana. Kunto Adi kemudian memaparkan bahwa pembentukan undang-undang IKN yang termasuk di dalamnya mengatur penggunaan APBN sebagai sumber pendanaan IKN tidak melibatkan partisipasi publik dan konsultasi publik. Sehingga, saat Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 masyarakat tidak memiliki pilihan selain menerima. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah memiliki akses untuk memengaruhi persepsi publik di mulai dari titik nol yang kemudian memengaruhi Kompas.com dalam mengonstruksi wacana pemberitaan penggunaan APBN dalam pembangunan IKN terkait ketentuan penggunaan sumber resmi (*official source*). Kelompok pengamat ekonomi, akademisi, masyarakat sipil, maupun masyarakat yang terdampak atas pembangunan IKN ini tidak memiliki akses yang sama besar terhadap media. Akses yang berbeda terhadap jangkauan media dan pembuatan keputusan membuat pandangan mereka menjadi terpinggirkan dalam wacana pemberitaan. Cerminan ini kemudian membuktikan bahwa mereka yang lebih berkuasa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mempunyai akses pada media dan kesempatan lebih besar untuk memengaruhi kesadaran khalayak (Eriyanto, 2001).

Hierarki pengaruh melihat kekuasaan dan akses sebagai pengaruh level ekstramedia serta level ideologi yang terdapat dalam bagaimana media mengonstruksi wacana pemberitaan ini. Pengaruh ekstramedia juga tercermin dalam bagaimana wacana dipengaruhi oleh dinamika kebijakan fiskal IKN yang terus bergulir serta pengawasan dari pengamat ekonomi dan lembaga pengawas keuangan negara dalam perannya menyampaikan evaluasi kritis terhadap penggunaan APBN dalam pembangunan IKN.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis teks, Kompas.com mengonstruksi wacana sebagai isu yang perlu diawasi secara berkelanjutan. Secara makro, topik pemberitaan didominasi dengan dinamika pendanaan dan kebijakan fiskal IKN, serta kebutuhan anggaran APBN setiap tahun. Pada struktur skematik, alur wacana pemberitaan Kompas.com menunjukkan kecenderungan untuk

menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam pemberitaan Kompas.com mulai dari judul hingga penutup berita. Pada struktur mikro, elemen stilistik menonjol dengan penggunaan pilihan-pilihan kata seperti “menelan”, “menghabiskan”, “mengandalkan”, “bertumpu”, “dana jumbo”, dan “benalu”. Pilihan kata tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan APBN direpresentasikan sebagai isu yang memiliki konotasi negatif dan mengandung evaluasi kritis.

Berdasarkan analisis kognisi sosial, konstruksi wacana pemberitaan Kompas.com melihat manusia, peranan, sosial, dan peristiwa dipengaruhi oleh proses kognitif jurnalis dan redaksi. Jurnalis yang secara profesional bekerja untuk Kompas.com melihat kebijakan editorial terhadap pemilihan sumber berita dan kode etik jurnalistik sebagai hal yang mutlak dalam praktik jurnalistik di lapangan yang memengaruhi cara pandang terhadap isu penggunaan APBN dalam pembangunan IKN. Pemilihan sumber informasi dari *official source* adalah hal yang lumrah dalam praktik jurnalistik di Indonesia. Hal tersebut kemudian sejalan dengan pernyataan Dosen Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran yang mengungkapkan adanya budaya kedekatan pers Indonesia dengan *official source*. Pengaruh ini kemudian diidentifikasi sebagai pengaruh yang berasal dari individu jurnalis itu sendiri, rutinitas media, dan visi misi Kompas.com.

Berdasarkan analisis konteks sosial, konstruksi wacana pemberitaan Kompas.com terkait penggunaan APBN dalam pembangunan IKN dipengaruhi oleh praktik kekuasaan dan akses terhadap media. Dominasi *angle* berita yang berfokus pada sudut pandang dan kebijakan pemerintah merupakan cerminan dari adanya praktik kekuasaan yang dijalankan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas penggunaan APBN dalam pembangunan IKN terhadap media Kompas.com. Kelompok pengamat ekonomi, akademisi, masyarakat sipil, maupun masyarakat yang terdampak atas pembangunan IKN ini tidak memiliki akses yang sama besar terhadap media. Akses yang berbeda terhadap jangkauan media dan pembuatan keputusan membuat pandangan mereka menjadi terpinggirkan dalam wacana pemberitaan. Pengaruh kekuasaan pemerintah dan perbedaan akses terhadap media ini kemudian diidentifikasi sebagai pengaruh yang berasal dari ekstramedia atau di luar redaksi Kompas.com.

Secara keseluruhan, wacana pemberitaan Kompas.com cenderung dikonstruksi sebagai bentuk legitimasi terhadap penggunaan APBN dalam proyek pembangunan IKN melalui dominasi perspektif pemerintah. Konstruksi tersebut tercermin melalui penonjolan sudut pandang pemerintah melalui informasi yang bersumber dari aktor-aktor pemerintah, serta penggunaan bahasa yang mendukung narasi penggunaan APBN dalam pembangunan IKN. Hal

tersebut ditunjukkan melalui struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial yang secara konsisten mengarahkan pembaca pada pemaknaan bahwa penggunaan APBN merupakan instrumen pendanaan yang sah yang diatur di dalam undang-undang dan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam merealisasikan pembangunan IKN. Meskipun pemberitaan turut memuat pandangan kritis dari lembaga pengawas maupun akademisi, perspektif tersebut dinarasikan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan daripada sebagai penolakan terhadap penggunaan APBN itu sendiri.

DAFTAR REFERENSI

Adlah, Y. Y., & Hamdani, A. (2023). Struktur Teks, Kognisi dan Konteks Sosial dalam Pemberitaan Online Mengenai Pengusungan Gibran Sebagai Cawapres. *Jurnal Lingue: Bahasa, Budaya, dan Sastra*, *5*(2), 40-52. https://doi.org/10.33477/lingue.v5i2.5891.

Alexander, H. B. (2024). *Tahun Ini, Pemerintah Siapkan Dana Rp 39,3 Triliun untuk IKN*. Kompas.com. https://ikn.kompas.com/read/2024/03/26/163036887/tahun-ini-pemerintah-siapkan-dana-rp-393-triliun-untuk-ikn.

Alexander, H. B. (2024). *UPDATE IKN: Progres 61,7 Persen, Habiskan APBN Rp 89 Triliun*. Kompas.com. https://ikn.kompas.com/read/2024/12/10/080000287/update-ikn--progres-61-7-persen-habiskan-apbn-rp-89-triliun

Arshad, M., & Khan, N. (2021). A critical discourse analysis of the Pakistani newspaper headlines on the federal budget for FY 2021-2022. *Journal of Humanities, Social and Management Sciences (JHSMS)*, *2*(1), 176-186. https://doi.org/10.47264/idea.jhsms/2.1.15.

Dijk, T. A. v. (1993). Principles of critical discourse analysis. *Sage Journals*, *4*(2), 249-283. https://doi.org/10.1177/0957926593004002006.

Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana ; Pengantar Analisis Teks Media*. LKiS Yogyakarta.

Gyollai, D. (2022). The sociocognitive approach in critical discourse studies and the phenomenological sociology of knowledge: intersections. *Springer*, *21*, 539-558. https://doi.org/10.1007/s11097-020-09704-z.

Haryatmoko. (2016). *Critical Discourse Analysis*. Rajawali Pers.

Hidayah, S. R., Nurhayati, N., & Kmur, A. H. (2026). Strategi Manipulasi Pemerintah Terhadap Legitimasi IKN Melalui Sikap Petani dan Nelayan: Analisis Wacana Kritis. *Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra*, *17*(1), 95-110. https://doi.org/10.31503/madah.v17i1.1298.

Laila, F., & Nurhaqiqi, H. (2024). Hierarki Pengaruh dalam Penentuan Berita Pascapemilu di Media Massa: Studi pada Kebijakan Redaksi Liputan 6 SCTV Biro Surabaya. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, *7*(9), 9889-9898. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i9.5887.

Laksono, M. Y., & Alexander, H. B. (2024). *BPK Soroti Pendanaan Pembangunan IKN yang Masih Andalkan APBN*. Kompas.com. https://ikn.kompas.com/read/2024/06/11/182709987/bpk-soroti-pendanaan-pembangunan-ikn-yang-masih-andalkan-apbn.

Maharani, A. S. A., & Alexander, H. B. (2024). *Pembangunan IKN Butuh Anggaran Rp 466 Triliun*. https://ikn.kompas.com/read/2024/07/31/174441987/pembangunan-ikn-butuh-anggaran-rp-466-triliun

Milanda, O., Almira, N., & Malik, G. A. (2024). Besarnya Pertumbuhan Angka Penduduk Indonesia (Overpopulation dalam Persfektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. *JME: Journal of Multidiscipline and Equlity*, *1*(2), 6352-6358. https://doi.org/10.70656/jme.v1i2.178.

Mugni, A. A., Agustini, & Luthfie, M. (2024). Kognisi Sosial dalam Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk pada Pemberitaan Wacana Difabel Netra di Media Online Sukabumiupdate.com. *Karimah Tauhid*, *3*(6), 6352-6358. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i6.13567.

Mulyana. (2021). *Metodologi Penelitian Wacana; Panduan Aplikatif Penelitian Wacana*. Graha Ilmu.

Musfialdy, M. (2019). Independensi Media Pro-Kontra Objektivitas dan Netralitas Pemberitaan Media. *Jurnal Riset Komunikasi (JURKOM)*, *2*(1), 21-28. https://doi.org/10.24329/jurkom.v2i1.50.

Pedati, L., Zahra, A. F., Fairus, M. K., Jamaludin, A., Lubis, M. H. P., & Heryanto, G. G. (2024). Hierarki Pengaruh dalam Kebijakan Redaksi MetroTV: Studi Kasus Pemberitaan Pilpres 2024. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, *5*(3), 1371-1382. https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i3.5857.

Reese, S. D., & Shoemaker, P. J. (2016). A media sociology for the networked public sphere: The hierarchy of influences model. *Mass Communication and Society*, *19*(4), 389-410. https://doi.org/10.1080/15205436.2016.1174268.

Risdianto, F., Sumarlam, S., Djatmika, D., & Wiratno, T. (2024). Appraisal and ideology realization in Indonesia state capital relocation ews texts. *International Journal of Society, Culture & Language*, *12*(2), 75-88. https://doi.org/10.22034/ijscl.2024.2022445.3381.

Sari, N. P., & Markhamah, M. (2024). Wacana Berita IKN Nusantara di IDN Times dan Kompas menurut Framing dan Agenda Seting. *BAHTERA INDONESIA: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, *9*(2), 626-634. https://doi.org/10.31943/bi.v9i2.786BAH.

Tialani, K. T., & Hudiono, Y. (2023). Analisis Wacana Kritis Van Dijk Pemberitaan Pada Progres Ibu Kota Negara Indonesia. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, *2*(10), 1139-1152. https://doi.org/10.53625/joel.v2i10.5747.

Witanto, Y., Duku, S., & Yahya, A. H. (2024). Analisis Framming Pemberitaan Ibu Kota Negara (IKN) Pada Media Nasional CNN Indonesia dan Kompas.com. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, *2*(2), 348-369. https://doi.org/10.62379/jiksp.v2i2.1881.